

## BAB IV

### Implikasi Institusi Bretton Woods pada Peran Pemerintahan di Indonesia

Globalisasi telah menciptakan ruang di mana negara tidak lagi menjadi satu – satunya aktor dalam ekonomi politik global. Itu merupakan fakta yang sepertinya harus diakui kebenarannya. Ada banyak aktor yang kini mempresentasikan diri sebagai “penguasa” yang melampaui kemampuan negara bangsa dan masyarakat dunia. Aktor yang dimaksud adalah perusahaan – perusahaan multinasional dan lembaga – lembaga multilateral. Gerakan sipil lintas batas negara bangsa (misalnya: Green Peace) juga menjadi aktor penting lainnya, tetapi tidak sekuat kedua aktor yang disebutkan sebelumnya. Keberadaan aktor – aktor ini telah membuat otonomi negara semakin berkurang.

Dalam hal ini, Francis Fukuyama juga melihat negara sebagai suatu unit pemerintahan dan satu-satunya pemegang otoritas pemaksa dalam masyarakat. Sehingga dalam pandangannya negara memiliki dua dimensi yang berbeda, yaitu kekuatannya dan cakupan peranannya. Negara itu bisa kuat (*strong state*) karena dia mampu melahirkan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang ditaati oleh masyarakat tanpa perlu menebarkan ketakutan, kecemasan, paksaan yang berlebihan. Berbeda dengan negara lemah (*weak state*) dimana ada suatu kekacauan yang berujung pada anarki dan menimbulkan konflik, yakni dengan tidak adanya kesadaran bahwa

aturan-aturan hukum hanya menjadi permainan kata-kata dalam undang-undang, korupsi merajalela, adanya gerakan separatisme, kerusuhan rasial dan etnis, dan semakin adanya suatu otoritas dari lembaga yang tidak berfungsi dan mengakibatkan negara dalam keadaan lemah.<sup>89</sup>

Pemberian label *strong states dan weak states* ini adalah sebuah label yang diberikan kepada sebuah negara untuk melihat sejauh mana negara tersebut mampu untuk menyediakan *political goods* yang terbagi dalam sebuah konsep *governability*. *Governability* yang dimaksud adalah sebuah kapasitas atau kemampuan sebuah negara bangsa untuk mengelola maupun menyediakan barang-barang politik (*political goods*).

Selanjutnya Francis Fukuyama<sup>90</sup> mengungkapkan bahwa setelah perang dingin berakhir, dalam hal ini negara-negara yang teridentifikasi sebagai negara lemah telah menjadi masalah utama dalam tata dunia baru. Adapun pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa kenyataan bahwa perkembangan globalisasi memunculkan fenomenan transnasional yang tidak semata-mata membawa dampak positif bagi sebuah negara seperti arus modal asing, investasi, perdagangan, maupun teknologi komunikasi yang semakin luas, namun fenomena ini membawa serta aktifitas-aktifitas kriminal seperti terorisme internasional, proliferasi senjata, organisasi kejahatan, bahkan global pandemic seperti flu burung, HIV/AIDS. Masalah-masalah ini menjadi sebuah tantangan besar bagi sebuah negara. Dan secara umum negara-negara yang terkategori memasuki fase-fase *weak*

---

<sup>89</sup> Fukuyama Francis, 2004. *State Building: Governance and World Order in the 21<sup>st</sup> Century*, Ithaca, N.Y., Cornell University Press. London

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 92

*state* ini adalah negara-negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, atau adanya tekanan dari masyarakat yang meningkat ke permukaan yang menjelma sebagai konflik dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan sarana-sarana *political goods* yang masih terasa kurang, bahkan nyaris tidak terlihat.

Dengan keberadaan institusi Bretton Woods bukan berarti negara yang berlabel *weak state* terbantu, karena hubungan antara institusi Bretton Woods dengan *weak state* hanya menguntungkan institusi Bretton Woods. Institusi tersebut bukan hanya mendapatkan keuntungan di segi ekonomi saja, di bidang politik pun institusi tersebut mendapatkan posisi tawar menawar yang tinggi dalam hal SAP yang ditawarkan disetiap pinjaman yang akan diberikan dan justru menyebabkan negara tersebut ketergantungan dengan institusi tersebut.

Globalisasi neoliberal yang menggeser *state-led development* ke arah *market-driven development* dengan menjunjung tinggi prinsip *laissez-faire* ternyata gagal menciptakan kemakmuran. Sebaliknya, moral darwinisme sosial yang dibawa oleh ideologi pasar bebas liberal telah menciptakan kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat, baik antar maupun dalam negara.

Dengan melihat Indonesia, instabilitas keuangan global telah menciptakan krisis yang berimplikasi pada dua hal pokok. *Pertama*, krisis menyulut demokratisasi politik. *Kedua*, krisis menciptakan tatanan neoliberal dalam negeri yang semakin kuat sehingga sebagaimana



ditunjukkan oleh banyak studi, kesenjangan semakin meningkat. Hal ini akan mengurangi kualitas demokrasi. Ditambah dengan pencabutan subsidi yang membuat biaya – biaya pendidikan dan kesehatan semakin besar berakibat pada kemiskinan dan kesenjangan yang semakin parah. Akibatnya demokrasi substansial menjadi kurang bermakna. Kondisi ini semakin diperparah menguatnya kekuatan korporasi global dalam perekonomian sehingga, meminjam istilah Noreena Hertz<sup>91</sup>, politik menjadi mandul. Perbincangan dan debat politik tidak lagi menyentuh persoalan – persoalan mendasar warganegara, tetapi lebih pada persoalan – persoalan elite yang kurang menyentuh kebutuhan warganegara.

Di bawah situasi interdependensi yang kompleks, makna kedaulatan akan mengalami pergeseran.<sup>92</sup> Negara bangsa dalam suatu batas teritorial tertentu tidak akan dapat lagi menggunakan kekuasaan otoritatifnya atas nama kedaulatan nasional menyangkut persoalan-persoalan dalam negeri, yang seharusnya menjadi wewenang otoritatifnya. Ini karena keputusan-keputusan penting mungkin diformulasikan oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang berbasis global atau kebijakan yang diambil suatu negara akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap negara lain. Dengan kata lain, otonomi negara telah sedemikian berkurang karena semua kebijakan dan keputusan yang diambil oleh elite-elite pemegang tidak dapat melepaskan diri dari dampak dan pengaruh negara lain.

---

<sup>91</sup> Noreena Herz, 2003. *The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy*. New York: Harper Collins Publisher Inc, hal. 8.

<sup>92</sup> Robert O. Keohane. 2000, "Sovereignty in International Society". Dalam David Held and Anthony Mc.Grew(eds.). *the Global Transformation: A Reader*, Cambridge: Polity Press, hal 117.

Di sisi lain, gejala interdependensi telah membuat institusi politik domestik dan internasional tetap mempunyai variasi yang beragam dalam bentuk, kekuatan, dan fungsinya. Namun, rezim internasional akan tetap menyediakan jaringan pengaturan hubungan *interstate* dan hubungan-hubungan transnasional meskipun meningkatnya kompetisi ekonomi akan membatasi rezim-rezim seperti ini dan dalam menyediakan landasan bagaimana ketidaksepakatan dalam suatu aturan hendaknya diterapkan<sup>93</sup>. Di sisi yang lain, lembaga-lembaga ekonomi global juga semakin mengambil peran yang cukup signifikan di era sekarang ini. *IMF*, *World bank*, dan *WTO* telah menjadi *governance* global yang menentukan banyak kebijakan di negara-negara Dunia Ketiga, terutama negara-negara yang bangkrut akibat krisis. *IMF*, misalnya, telah menjadi lembaga global yang mempunyai kekuatan “memaksa” dalam mendesakkan restrukturisasi ekonomi di negara-negara yang mengalami krisis melalui *Structural Adjustment Programs* (SAPs).

Kemiskinan dan ketimpangan hanya salah satu dimensi kritis globalisasi dalam melihat demokrasi. Pada kenyataannya, meskipun kenaikan tingkat pendapatan terjadi di banyak negara seiring pembangunan ekonomi selama 5 dekade yang lalu, demokrasi ternyata telah ditelikung oleh aktor-aktor ekonomi politik global. Mereka adalah perusahaan-perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga multilateral seperti *IMF*, *World Bank*, *WTO* seperti yang sudah dijelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya. Lembaga-lembaga ini mempunyai kekuasaan ekonomi dan juga politik yang

---

<sup>93</sup>*Ibid*, hal. 118

sangat besar, tetapi keberadaan mereka lebih mereflesikan kepentingan-kepentingan perusahaan transnasional<sup>94</sup> dibandingkan dengan warganegara di seluruh dunia.

William K. Tabb mengemukakan bahwa ketimpangan distribusi kekayaan tidak hanya mengentalkan iri hati, tetapi juga memberikan dasar material bagi pengaruh politik, yaitu kemampuan untuk membentuk diskursus publik dan keputusan negara. Sekarang ini, setelah proyek liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi, diplomasi politik negara tidak lagi ditujukan untuk kepentingan bersama di antara warganegara, tetapi untuk kepentingan-kepentingan korporasi. Ini menjadi masuk akal karena perusahaan-perusahaan besar tersebut memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pencapaian karier politik.

Di negara-negara demokrasi, para pejabat publik yang gagal mengatasi persoalan-persoalan ekonomi masyarakat akan mendapatkan sanksi dengan tidak dipilih kembali pada pemilu selanjutnya. Namun, ketika IMF menjerumuskan ekonomi Indonesia ke dalam krisis yang semakin dalam mereka tidak mendapatkan konsekuensi sedikit pun. Rakyat tidak mempunyai hak untuk menuntut lembaga tersebut. Sebaliknya, negara Indonesia harus menanggung utang yang sangat besar.

Namun globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan, marjinalisasi rakyat, serta persoalan keadilan sosial.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>*Ibid*



Tidak bisa dipungkiri, kecenderungan globalisasi neoliberal adalah menguatnya kekuasaan baik ekonomi – politik pada segelintir orang atau kelompok orang. Oleh karena itu, hal tersebut sangat membahayakan demokrasi karena ketimpangan yang diciptakannya. Perusahaan – perusahaan transnasional yang beroperasi lintas batas negara kini mempresentasikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan sekaligus politik. Perusahaan – perusahaan inilah yang sekarang berkuasa dan melakukan “pembajakan” atas demokrasi yang kini tengah berlangsung. Menguatnya pengaruh perusahaan – perusahaan multinasional dan transnasional ini tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga di lembaga – lembaga multilateral, seperti IMF dan WTO.

Di era globalisasi sekarang ini, implementasi ideologi neoliberal bersandar sangat kuat di tiga institusi global, yakni *World Bank*, *IMF*, *WTO*. *World Bank* dan *IMF* mengimplementasikan ideologi neoliberal melalui apa yang disebut Konsensus Washington yang terefleksikan dalam program-program penyesuaian struktural. Sementara *WTO*, mendesakkan agenda neoliberal melalui proyek perdagangan bebas.

### **A. *Structural Adjustment Programs***

Sebelum membantu negara-negara yang terkenan krisis, sesuai dengan isi dari Konsensus Washington, IMF menyarankan negara-negara tersebut mengimplementasikan 10 elemen sebagai berikut:<sup>96</sup> 1. Disiplin fiskal; 2. Prioritas pengeluaran publik; 3. Reformasi pemungutan pajak; 4.

---

<sup>95</sup> Ibid, hal 198

<sup>96</sup> Deliarnov hlm 191

Liberalisasi finansial; 5. Kebijakan luar negeri yang mendorong persaingan; 6. Liberalisasi perdagangan; 7. Mendorong kompetisi antara perusahaan asing dan domestik untuk menciptakan efisiensi; 8. Mendorong privatisasi; 9. Mendorong iklim deregulasi; 10. Pemerintah melindungi hak kekayaan intelektual. Jika dipersingkat dari 10 elemen di atas adalah, liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Dan ketiga syarat tersebut harus dilakukan bagi negara yang ingin dibantu oleh IMF. Nama programnya adalah SAP.

Program penyesuaian struktural (SAPs) adalah suatu paket kebijakan yang sejalan dengan apa yang sering disebut dengan istilah neoliberalisme, suatu versi bercakupan luas dari agenda perdagangan bebas. Tujuan pokok SAPs ini adalah mengupayakan agar negara-negara Dunia Ketiga membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya korporasi-korporasi transnasional untuk memperoleh akses tenaga kerja dan sumber-sumber daya alam mereka, memperkecil peran pemerintah, menggantungkan pendistribusian berbagai sumber daya alam dan pelayanan sepenuhnya pada kekuatan pasar, dan mengintergrasikan negara-negara miskin tersebut ke dalam perekonomian global.<sup>97</sup> *Structural Adjustment Programs* (SAPs) yang didesakkan IMF dan Bank Dunia menjadi sebab menajamnya kemiskinan dan kesenjangan. SAPs ini bersandar pada ideologi neoliberal sehingga hegemoni neoliberalisme pada dasarnya yang menjadi faktor utama kesenjangan global meningkat dengan tajam, dan angka ketidakkemakmuran masih sangat besar.

---

<sup>97</sup> Kevin Danaher, 2005. *10 Alasan Bubarkan IMF dan Bank Dunia*. Yogyakarta: CIndelaras, hal. 116.



Di luar pengaruh korporasi-korporasi global, lembaga-lembaga multilateral, seperti WTO, IMF dan juga World Bank sama sekali tidak demokratis, bahkan dalam pengertiannya yang paling tradisional sekalipun. Joseph E. Stiglitz telah menuding kedua lembaga multilateral IMF dan World Bank dengan mengatakan, "Persoalan mendasar yang saya jumpai di IMF dan World Bank adalah hak-hak pilih pun tidak diletakkan pada prinsip-prinsip suatu masyarakat yang demokratis. Sebagian besar suara jatuh ke negara-negara industri kaya. Di AS dan Eropa sendiri, tak seorang pun sudi menerima prinsip bahwa satu dollar sama dengan satu suara. Namun faktanya, itulah prinsip yang mendasari IMF dan World Bank. Semakin banyak uang yang anda miliki semakin banyak pula suara yang anda peroleh."<sup>98</sup>

Kebijakan negatif IMF dalam mengatur program-program untuk Indonesia. Mereka hanya mementingkan liberalisasi pasar, deregulasi, dan privatisasi di Indonesia untuk kepentingan perekonomian internasional. Padahal secara pendekatan ekonomi politik tidak akan mungkin dapat merubah sistem perekonomian suatu negara menjadi negara berbasis pasar dalam waktu "sekejap malam".

Pada peranan IMF terhadap Indonesia dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan oleh IMF memeberikan dampak positif dan negatif. Tetapi dalam hal ini, dampak negatif dirasakan lebih banyak. IMF semakin tidak disenangi karena keinginannya untuk ikut campur tidak hanya pada bidang ekonomi tetapi merambah sampai pada bidang politik. Bantuan yang

---

<sup>98</sup> Dikutip dari Kevin Danaher, *Op.Cit.*, hal.25.

diberikan juga tidak membuat Indonesia maju tapi hanya membuat Indonesia makin terpuruk dengan jumlah hutang yang besar.

Garis besar dampak negatif:

- Membukakan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor dan pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan dan menghilangkan subsidi pada listrik, tarif telepon, dan bahan bakar minyak sangat menyengsarakan rakyat.

- Kebijakan penerapan fiskal ketat dan liberalisasi perdagangan dan sistem finansial yang termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan seperti pencabutan subsidi, penggenjotan pajak, privatisasi dan penjualan aset-aset perusahaan domestik secara murah membuat pihak asing semakin menentukan formulasi kebijaksanaan ekonomi dan sosial Indonesia dan penguasaan devisa pun akan berada di tangan mereka dengan intensitas yang lebih besar.

Menurut Cowan (1990:6) *privatization may be defined as the transfer of a function, activity, or organization from the public to the private sector.* Sementara menurut Savas (1987:3) privatisasi adalah tindakan / aksi mengurangi peranan pemerintah atau meningkatkan peranan sektor swasta dalam aktivitas atau dalam kepemilikan asset. Jadi kesimpulan yang dapat diambil mengenai privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi (istilah lain: denasionalisasi)

Privatisasi yang dilakukan pemerintah akan menimbulkan beberapa dampak negatif sebagai berikut:

1. Aset-aset penting suatu negara akan terkonsentrasi pada segelintir individu atau perusahaan yang memiliki modal besar serta kecanggihan manajemen, teknologi, dan strategi.

2. Pemerintah menjadi lemah. Sebaliknya posisi swasta menjadi kuat. Hal ini memungkinkan pihak swasta mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.

3. Negara-negara berkembang akan menjadi terbuka bagi masuknya investor asing, baik perorangan maupun perusahaan. Kondisi ini pada gilirannya akan mengakibatkan ketergantungan pada pihak asing.

4. Pengalihan kepemilikan khususnya di sektor pertanian dan industri. Investor dalam sistem kapitalis cenderung beranggapan bahwa efisiensi akan mudah dicapai dengan teknologi padat modal bukan teknologi padat karya.

5. Negara tidak sanggup lagi melaksanakan banyak tanggung jawab yang dipikulnya karena negara telah kehilangan sumber-sumber pendapatannya.

Inilah kenyataan yang sekarang kita hadapi. Lembaga-lembaga multilateral ini telah menjadi kekuatan politik yang sangat kuat, tetapi sama sekali tidak demokratis sebagaimana dikemukakan oleh Stiglitz di atas. Di luar itu, lembaga yang mampu memaksakan kebijakan-kebijakan publik di negara-negara yang mereka bantu ini tidak mempunyai akuntabilitas sama sekali kepada rakyat. Para direktur lembaga ini tidak pernah dipilih dalam



cara yang demokratis, dan ketika resep-resep yang mereka tawarkan menjerumuskan suatu negara ke dalam krisis yang berkepanjangan dan parah. Namun, mereka tidak pernah mendapatkan sanksi sebagaimana lazimnya dalam sistem demokrasi.

### **B. Delapan Ciri Menonjol *World Trade Organizations***

Bonnie Setiawan dari INFID mengemukakan bahwa delapan ciri menonjol dari WTO.<sup>99</sup> Pertama WTO adalah sebuah badan yang telah dipersiapkan dengan baik dan cukup lama oleh negara-negara maju selama berlangsungnya putaran Uruguay dalam kerangka GATT. Badan ini telah menjadi menjadi badan negosiasi multilateral, artinya badan yang mempunyai kewenangan dan otoritas atas berbagai pengaturan tingkat dunia terhadap anggota-anggotanya berdasarkan kesepakatan perundingan. *Kedua*, WTO mempunyai tiga prinsip dasar yang efektif menerobos halangan-halangan proteksionisme negara dan pintu masuk bagi berbagai liberalisasi ekonomi domestik.

Ketiga prinsip tersebut adalah *Market Access*, yaitu kewajiban suatu negara untuk membuka pasarnya bagi produk barang dan jasa negara lain. Prinsip kedua adalah MFN (*Most Favoured Nation*) di mana negara yang paling difavoritkan atau diprioritaskan. Menurut Bonnie Setiawan, prinsip ini mengandung makna bahwa bila suatu negara memberikan fasilitas berbagai kemudahan akses pasar kepada negara lain, maka otomatis anggota-anggota WTO yang lain juga berhak mendapat fasilitas yang sama.

---

<sup>99</sup>Bonnie Setiawan, 2000. *STOP WTO: Dari Seattle hingga Bangkok*. Jakarta . INFID, hal. 8-12.

Prinsip ketiga adalah NT (*National Treatment*). Menurut prinsip ketiga ini, jika suatu negara sudah mengikat komitmen kepada WTO maka perusahaan-perusahaan yang masuk ke suatu negara harus diperlakukan sama dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Di sini, berlaku prinsip nondiskriminatif.<sup>100</sup>

Ciri ketiga adalah WTO merupakan sebuah kontrak seumur hidup. negara-negara anggota akan terikat seterusnya terhadap kewajiban-kewajiban dan komitmen yang telah diberikan hingga seluruh sektor tersebut terbuka sama sekali. Keempat, WTO mengenal istilah *progressive liberalization*, yakni suatu prinsip liberalisasi yang diperlakukan secara hebat dan terus maju. Kelima, WTO adalah rezim pasar bebas yang sepenuhnya menolak proteksionisme. Keenam, WTO memperkuat rezim “*Intellectual Property Right*” sebagai dasar atau inti kapitalisme. Ketujuh, WTO memperkuat edominasi negara maju di meja perundingan dengan mekanisme konsensus dan *green room*.<sup>101</sup> Kedelapan, WTO dalam kenyataannya membawakan agenda kepentingan negara maju dengan mengedepankan materi-materi perjanjian yang merupakan kepentingan utama negara maju. Ini bisa dilihat, misalnya dari poin-poin pokok dan bidang-bidang yang menjadi prioritas perjanjian yang secara garis besar bahkan hampir keseluruhan menguntungkan negara maju. Prinsip MFN dan *Intellectual Property Right* merupakan contoh yang paling nyata.

---

<sup>100</sup>Ibid

<sup>101</sup>*Green room* merujuk pada ruangan khusus di Jenewa yang berwarna hijau, yang diadakan untuk sedikit saja negara yang dipilih oleh negara maju untuk ikut dalam perundingan. Bonnie Setiawan, Ibid., hal. 12.

Dengan melihat keseluruhan diatas, tidak berlebihan jika WTO merupakan “alat” negara maju untuk mengukuhkan dominasi ekonomi dan perdagangannya di negara-negara berkembang. Banyak aspek di antara perjanjian tersebut sebatas merefleksikan nafsu negara maju untuk memperluas pasar-pasar mereka di luar.Suatu motif yang sebenarnya tidak jauh berbeda jika dibandingkan pada abad 17 dan 18. Oleh karena itu, Chakravarti Raghavan dari Perwakilan *Third World Network* benar ketika mengatakan bahwa dari perspektif negara berkembang secara umum (dan terutama negara miskin dan pinggiran), tatanan perdagangan baru di bawah WTO lebih banyak mempunyai aspek negatif daripada positif.

Menurutnya meskipun tatanan itu dapat menguntungkan sebagai sistem yang berdasarkan pada aturan-aturan dalam beberapa bidang wajib bagi negara maju, bersifat mendua dan tidak jelas. Sementara aturan-aturan bagi negara berkembang, menurutnya, bersifat sangat spesifik dan sulit, dari hak atas kekayaan intelektual diambil alih guna melayani keserakahan perusahaan-perusahaan besar dan mengamankan investasi mereka melalui monopoli pengetahuan.<sup>102</sup>

Salah satu kesalahan mendasar yang dilakukan oleh banyak pengambil keputusan publik di Negara-negara sedang berkembang adalah keyakinan yang terlalu berlebihan dalam melihat liberalisasi dan masuknya investasi. Dari sudut pandang ini, liberalisasi dan juga privatisasi diharapkan akan mampu menarik investasi asing masuk. Padahal, liberalisasi bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh atas keputusan masuk tidaknya

---

<sup>102</sup>Dikutip dari Bonnie Setiawan,*Ibid.*,hal.103



investasi asing. Masih ada banyak faktor lainnya seperti besarnya pasar domestik, birokrasi yang tidak korup dan efisien, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja atau buruh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semata menyandarkan pada kebijakan liberalisasi dengan harapan investasi asing masuk adalah naif.<sup>103</sup>

Reformasi di tubuh WTO sekiranya harus dilakukan walaupun peluangnya sangat kecil. Suatu kerja sama yang luas harus digalakkan oleh Negara-negara berkembang dalam usaha mendesakkan kepentingan-kepentingan ekonomi dan perdagangan mereka sendiri. Negara – Negara sedang berkembang harus mampu mendesakkan model-model pengambilan keputusan di luar konsensus melalui mekanisme *one man one vote* sebab dengan begitu Negara-negara sedang berkembang dapat menggunakan keunggulan jumlah. Sebaliknya, jika pola konsensus yang dikembangkan maka akan sangat mungkin semua perjanjian dalam kerangka WTO tidak akan pernah mencerminkan kepentingan negara-negara sedang berkembang.

Neoliberalisme adalah sebagai penyebab mengapa institusi-institusi Bretton Woods gagal dalam pembangunan. Adapun sebabnya, yang pertama basis ideologi neoliberal adalah kompetisi. Padahal, kompetisi hanya akan berlangsung secara adil bila masing-masing memiliki persiapan yang sama / kapasitas yang sama. Ideologi pasar bebas neoliberal tidak pernah mempersoalkan darimana sebuah industri berangkat, dan sudah pada taraf seperti apakah industri itu. Mereka menolak premis-premis proteksi bagi industri kecil karena hal tersebut akan mengganggu mekanisme pasar untuk

---

<sup>103</sup>Hal. 51 budi winarno

berkerja dengan baik. Keyakinan ini masih dibungkus dengan janji akan akses produk barang murah ketika suatu negara membuka pasar sebebas-bebasnya. Tidak peduli bahwa akses barang murah itu menghancurkan industri dalam negeri.<sup>104</sup>

Sebab yang kedua adalah pembelaan atas pasar telah membuat peran negara dalam pembangunan menjadi sedemikian marginal. Paham neoliberal atau neoliberalisme<sup>105</sup> pada dasarnya dapat diringkas dalam dua definisi, yakni 1. Paham / agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi homo-economicus atas dimensi lain dalam diri manusia (homo culturalis, zoon politicon, dan lain sebagainya); 2. Sebagai kelanjutan pokok pertama, neoliberalisme juga bisa dimaknai sebagai dominasi sektor finansial atas sektor riil dalam tata ekonomi politik. Konsekuensi dari pandangan ini membuat negara tidak diizinkan campur tangan dalam perekonomian karena pasarlah satu-satunya mekanisme paling efektif yang bisa diandalkan untuk mendistribusikan sumber-sumber ekonomi langka.

*“Economic Hit Men (EHM) adalah profesional berpenghasilan sangat tinggi yang menipu negara-negara di seluruh dunia triliunan dolar. Mereka menyalurkan uang dari Bank Dunia, USAID, dan organisasi “bantuan” luar negeri lainnya menjadi dana korporasi-korporasi raksasa dan pendapatan beberapa keluarga kaya yang mengendalikan sumber-sumber daya alam di planet bumi ini. Sarana mereka meliputi laporan*

---

<sup>104</sup> Budi winarno hal 64

<sup>105</sup> B.Herry Priyono, 2004. “Marginalisasi ala Neoliberal”. *Basis*, Nomor 05-06, Tahun ke-53, Mei-Juni 2005.

*keuangan yang menyesatkan, pemilihan yang curang, penyuapan, pemerasan, seks dan pembunuhan. Mereka memainkan permainan yang sama tuanya dengan kekuasaan, sebuah permainan yang telah menentukan dimensi yang baru dan mengerikan selama era globalisasi. Aku tahu itu, aku adalah seorang Economic Hit Men.*"<sup>106</sup>

Kutipan di atas merupakan pengakuan dari John Perkins, seorang ahli ekonomi yang mengaku telah melakukan pekerjaan "kotor" kepada negara-negara berkembang di seluruh dunia dengan label kebaikan dan iming-iming uang "bantuan" dari lembaga-lembaga keuangan internasional, dan salah satu yang terbesar adalah Bank Dunia. Pengakuan ini merupakan satu dari sekian banyak kontroversi yang meliputi Bank Dunia, baik anggota di dalamnya, tujuan didirikannya, aliran dana yang dikucurkannya, hingga program-program "bantuan" keuangannya bagi negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Rittberger dan Zangl menulis, sejak tahun 1970-an Bank Dunia mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang perekonomian antara negara berkembang dan negara maju. Pada era itu, seiring dengan merdekanya negara-negara yang semula terjajah, jumlah negara berkembang semakin meningkat. Negara-negara berkembang menuntut distribusi kemakmuran yang lebih merata dan negara-negara maju

---

<sup>106</sup> John Perkins, *Economic Hit Man* (edisi terjemahan), Jakarta: Abdi Tandur.



memenuhi tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan di negara-negara berkembang.<sup>107</sup>

Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun dalam prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (*structural adjustment program*). Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia akan memberi fiskal. Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi.

## **C. Program SBY yang Terpengaruh Bretton Woods**

### **1.1. Pencabutan Subsidi BBM**

Pemerintah Indonesia sering didesak untuk segera mencabut subsidi kepada rakyat di setiap pertemuan organisasi perdagangan bebas. Pencabutan subsidi BBM dinilai sebagai faktor penghambat sistem perdagangan bebas dan mendistorsi perusahaan multinasional ke Indonesia. Subsidi energi dicabut agar mulai dari hulu hingga hilir tidak ada hambatan bagi perusahaan asing dalam konektivitas dan kesempatan investasi. Intervensi asing dalam sektor migas Indonesia bisa terlihat dari tekanan dalam bantuan teknis, seperti mulai dari perubahan undang-undang

---

<sup>107</sup> Volker Rittberger dan Bernard Zangl, 2006, *International Organization*, hal. 172, New York: Palgrave MacMilan.

mengenai energi sampai meningkatkan energi alternatif diatur dalam mekanisme utang.<sup>108</sup>

Bantuan teknis mengenai dana kompensasi penghapusan subsidi telah didesain instrumen utang sehingga apabila tidak dilaksanakan, Indonesia tidak mendapatkan utang. Seluruh hutang bukan pada masalah nominalnya, melainkan telah mendikte seluruh kebijakan nasional.<sup>109</sup>

## **1.2. Program Hutang**

Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar;

### **a. Hutang proyek**

Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit. Namun, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia.

### **b. Hutang Dana Segar**

Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain:

1. Swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan,
2. Deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk

memasuki semua sector,

---

<sup>108</sup> [www.apemindo.com/about-us/visi-misi/81-news/media-news/290-kenaikan-bbm-desakan-internasional](http://www.apemindo.com/about-us/visi-misi/81-news/media-news/290-kenaikan-bbm-desakan-internasional).

<sup>109</sup> Ibid.

3. Pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, pupuk dan rokok:

- a. Pada bulan Desember 2004 terjadi inflasi 1,04 persen. Kota-kota IHK yang berjumlah 45 kota seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Mataram sebesar 2,35 persen, dan inflasi terendah di Bandar Lampung 0,19 persen.
  - ii. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada semua kelompok barang dan jasa sebagai berikut : kelompok bahan makanan naik sebesar 2,37 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,92 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,89 persen, kelompok sandang 0,58 persen, kelompok kesehatan 0,73 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,04 persen dan kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan 0,04 persen.
  - iii. Kelompok yang memberikan andil inflasi tertinggi selama tahun 2004 adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 2,04 persen.
  - iv. Komoditas yang paling dominan memberikan andil inflasi nasional selama tahun 2004 adalah tarif kontrak rumah 0,68 persen.
4. Menaikkan tarif telepon dan pos,
  5. Menaikkan harga bahan bakar (BBM).



Selama masa pemerintahan SBY, harga BBM sudah empat kali naik. Pada periode pertama SBY, harga BBM tiga kali naik. Kenaikan pertama terjadi pada 1 Maret 2005, hanya empat bulan sesudah SBY dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2004. Saat itu harga BBM dinaikkan karena terjadi lonjakan harga minyak dunia. Premium naik 32% dari Rp. 1.810 menjadi Rp. 2.400 per liter, sedangkan solar naik 27% dari Rp. 1.650 menjadi Rp. 2.100 per liter.

Kenaikan kedua harga BBM pada pemerintahan SBY terjadi pada tahun yang sama 1 Oktober 2005. Saat itu harga premium naik 87% dari Rp. 2.400 menjadi Rp. 4.500 per liter, dan harga solar naik 105% dari Rp. 2.100 menjadi Rp.4.300 per liter.

Kenaikan harga BBM selanjutnya terjadi pada 24 Mei 2008. Ketika itu krisis ekonomi global membuat harga minyak melambung. Premium pun naik dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 6.000 per liter. Harga BBM naik untuk terakhir kalinya di pemerintahan SBY pada 22 Juni 2013. Premium naik menjadi Rp. 6.500 per liter, dan solar menjadi Rp. 5.500 per liter.<sup>110</sup>

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Hendrik Siregar, mengatakan isu kenaikan harga BBM merupakan jebakan subsidi yang terjadi secara terus menerus sejak era pascareformasi. Jebakan itu terjadi bukan hanya disebabkan persoalan produksi minyak, melainkan adanya UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Undang-undang itu menjadi titik untuk kenaikan BBM atau subsidi BBM. Salah satu mandat undang-undang tersebut bahwa penentuan harga BBM tidak boleh lagi

---

<sup>110</sup> M.cnnindonesia.com/nasional/20140828162430-12-1997pasang-surut-harga-bbm-setiap-rezim/

sama dengan harga pasar. Namun yang terjadi justru menjadikan liberalisasi sektor hilir dengan dibukanya pengusaha-pengusaha swasta seperti petronas dan shell.<sup>111</sup>

#### **D. Dampak dan Kerugian**

Anggoro<sup>112</sup>, peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut.

##### 1. Kerugian dalam bidang ekonomi

- Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan pembangunan mineral ( karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnasional partner Bank Dunia)

- Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.

- Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.

---

<sup>111</sup> M.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/09/03/nbby2n-kenaikan-bbm-disebabkan-liberalisasi-minyak

<sup>112</sup> Ponny Anggoro, Why Does World Bank Control Indonesia, dimuat di jurnal Global Justice Update, Volume VI, 1<sup>st</sup> Edition, May 2008  
www.globaljust.org

- Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.

- Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastruktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon

## 2. Kerugian di bidang politik

- Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.

Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli<sup>113</sup>, “ Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga bidang sosial. Misalnya pinjaman sebesar 300 juta dollar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal.UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dollar AS dari Bank Dunia.”

---

<sup>113</sup> Rizal Ramli, Membangun dengan Lilitan Utang, sebagaimana diberitakan dalam [www.news.id.finroll.com/articles/75304-membangun-bangsa-dengan-lilitan-hutang](http://www.news.id.finroll.com/articles/75304-membangun-bangsa-dengan-lilitan-hutang)



Cara kerja Bank Dunia ( dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang, diceritakan secara detail oleh John Perkins dalam bukunya, "Economic Hit Men". Perkins adalah mantan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF, dll.

Mengenai pekerjaannya itu, Perkins <sup>114</sup>(2004: 13-16) menulis, " ... beliau mempunyai dua tujuan penting. Pertama, beliau harus membenarkan (*justify*) kredit dari dunia internasional yang sangat besar jumlahnya, yang akan disalurkan melalui Main dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone dan Webster) melalui proyek-proyek engineering dan konstruksi raksasa. Kedua, beliau harus bekerja untuk membangkrutkan negara-negara yang menerima pinjaman raksasa tersebut (tentunya setelah mereka membayar Main dan kontraktor Amerika lainnya), sehingga mereka untuk selamanya akan dicengkram oleh para kreditornya, dan dengan demikian negara-negara penerima utang itu akan menjadi target yang mudah ketika negara-negara pendonor memerlukan seperti pangkalan militer, suara/ dukungan di PBB, atau akses kepada minyak dan sumber daya alam lainnya.

Tak heran bila kemudian ekonom Joseph Stiglitz pada tahun 2002 mengkritik keras Bank Dunia dan menyebutnya "institusi yang tidak bekerja untuk orang miskin, lingkungan, atau bahkan stabilitas ekonomi". Dengan

---

<sup>114</sup> Opcit, John Perkins, Economic Hit Man, Hal 13-16

demikian, menurut Stiglitz, Bank Dunia pada prakteknya menyalahi tujuan didirikannya bank tersebut, sebagaimana disebutkan itu di awal yaitu untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan menjaga kestabilan ekonomi.

Melihat kinerja seperti ini, Anggoro<sup>115</sup>, Bank Dunia sesungguhnya telah melanggar Piagam PBB yang menyebutkan, “*to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples*”. Dengan kata lain, Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Bank Dunia malah memfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan keuangan melalui ekspansi ekonomi perusahaan multinasional dan membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan.

IMF dan Bank Dunia telah membuat perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat (khususnya Amerika Serikat) melalui dorongan untuk menjalankan deregulasi dan swastanisasi.

Namun apa yang resep disebutkan di atas menurut Joseph Stiglitz, hanya akan berhasil atas sejumlah persyaratan. Kalau tidak hanya akan menambah beban negara. Contohnya, liberalisasi pasar hanya akan memarginalkan kelompok-kelompok petani di negara miskin yang tidak mampu bersaing secara sehat dengan negara-negara maju. Stiglitz menambahkan bahwa IMF tidak merencanakan program bantuannya dengan tidak lebih dulu meneliti secara spesifik negara yang akan dibantu. Hal ini

---

<sup>115</sup> Opcit, Ponny Anggoro, Why Does World Bank Control Indonesia

diperkuat oleh Jeffrey Sachs yang mengatakan kalau IMF tidak meramu strategi yang pas untuk masing-masing negara karena memukul rata model krisis dari negara-negara tersebut.<sup>116</sup> Mantan PM Malaysia Anwar Ibrahim menambahkan kalau IMF hanya memberi khutbah dan menekankan negara yang menerima bantuannya.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup>Ibid 191-192

<sup>117</sup>Didik, J.Rachbini, *Analisis Kritis : Ekonomi Politik Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Belajar,2003,hlm.163